

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PARTISIPASI DI KAMPUNG ADAINASNOSSEN

Musdalifah Djamaluddin¹, Rifdan²

Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia^{1,2}

E-mail: musdalifahdjj@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan program di kampung Adainasnosen Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. Pendekatan penelitian yaitu kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang terlibat sebanyak 10 orang terdiri dari pemerintah desa, dan masyarakat, analisis dan penyajian data Mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi, reduksi data, penyajian data direduksi, langkah analisis dan penyajian data Mengumpulkan informasi dengan cara wawancara langsung, dokumentasi, observasi lapangan, reduksi data, penyajian data, langkah analisis selanjutnya ialah penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkap bahwa Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi di Kampung Adainasnosen Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor dinilai belum berjalan secara maksimal karena masyarakat hanya dilibatkan pada Musrebang, selain itu pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan informasi terhadap masyarakat mengenai bentuk program pemberdayaan di kampung Adainasnosen. Faktor penghambat yang timbul terkait partisipasi masyarakat yaitu: kurangnya partisipasi masyarakat dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Pemerintah dianggap menjalankan program pembangunan infrastruktur tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat yang dimana masyarakat setempat mayoritas sebagai petani, seyogianya pemerintah membangun sarana prasarana pertanian agar mempengaruhi produktifitas pertanian masyarakat

Kata Kunci: Pemberdayaan, Partisipasi, Masyarakat Desa

ABSTRACT

This study aims at community participation in program empowerment in Adainasnosen Village, Samofa District, Biak Numfor Regency. The research approach is descriptive qualitative, with data collection methods of observation, interviews, and documentation. Informants involved as many as 10 people consisting of the village government, and the community, data analysis and presentation Collecting information through interviews, direct observation and documentation, data reduction, data presentation is reduced, the next step of analysis is display and drawing conclusions. The results of the study reveal that community participation in participation-based community empowerment in Adainasnosen Village, Samofa District, Biak Numfor Regency is considered not running optimally because the community is only involved in Musrebang, besides that the government lacks socialization and information to the community regarding the form of empowerment programs in Adainasnosen village. The inhibiting factors that arise related to community participation are: the lack of community participation and the level of community social welfare. The government is considered to be running an infrastructure development program not based on the needs of the community where the majority of the local community are farmers, the government should build agricultural infrastructure in order to affect the community's agricultural productivity.

Keywords: *Empowerment, Participation, Village Community*

PENDAHULUAN

Usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencakupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu pemberdayaan adalah upaya dengan spectrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara (Miradj, S., & Sumarno, S. 2014).

Dalam pemberdayaan perlu dipikirkan siapa saja yang akan menjadi sasaran pemberdayaan (Widjajanti, K. 2011). Menurut Musa (2017) sasaran pemberdayaan yang dimaksud yaitu siapa yang akan menjadi kelompok atau masyarakat yang akan di perdayakan. Pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan kepentingan struktural terlebih dahulu (Kadir, A. G. 2013) Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep good governance (Modim, M. H., Alam, A. S., & Rusli, A. M. 2010). Konsep ini mengetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat, ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin kemitraan yang selaras (Pariangu, U. T. 2020).

Pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*) memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian. Pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian (Faricandy, D. H., & Agunggunanto, E. Y. 2018).

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Sinaga, H. 2019). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam berbagai hal (Hermanto, L. 2017).

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya termasuk aksesibilitasnya teradap sumberdaya yang terkait denan pekerjaannya, aktivitas sosialnya. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kea rah yang lebih sejahtera.

Untuk mempercepat ketertinggalan pembangunan sumber daya manusia, diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada yang mampu ikut serta/berpartisipasi. Selain itu, dalam proses menuju desa yang otonom, pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan kata lain, kemitraan dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam merupakan syarat utama dalam otonomi desa.

Berbagai program pemberdayaan desa saat ini dilaksanakan di Adainasosen Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, diantaranya pengelolaan pembangunan infrastruktur, pengelolaan UMKM memanfaatkan potensi anyaman diwilayah tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas masyarakat berdasarkan potensi wilayah yang ada melalui dana kur APBdes, pada faktanya bahwa partisipasi masyarakat tidak signifikan dalam keterlibatannya dalam proses pemberdayaan

tersebut disinyalir bahwa pemerintah kurang respon terhadap masyarakat sekaligus kurang melibatkan masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Serta masih terjadinya polarisasi masyarakat di kampung tersebut akibat dari dinamika politik desa (pemilihan desa) sehingga akibat dari polarisasi masyarakat tersebut pemberdayaan tidak berjalan efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. 2017), penelitian terdahulu dilakukan oleh (Dewi, M. H. U. 2013), penelitian terdahulu dilakukan oleh (Wirastari, V. A., & Suprihardjo, R. 2012), dan penelitian dilakukan oleh (Perdana, F. R. 2019). Hasil penelitian mereka mengungkap bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan di tingkat desa sangat diharapkan karena masyarakat menjadi sasaran awal sesungguhnya proses pemberdayaan, bila pemerintah tidak melibatkan masyarakat ke dalam bentuk proses pemberdayaan lantas siapa yang akan menjalankan program yang dikurcurkan.

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan pola baru pembangunan, yakni yang berkarakter "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*" Menurut Chambers, Konsep ini lebih luas bukan hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan yang mendalam (*safety net*), dimana pemikiran belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu (Hadi, A. P. 2010).

Pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi tiga Sandiasa, (G., & Widnyani, I. A. P. S. 2017). yaitu: *pertama*, menciptakan semangat atau iklim yang memungkinkan kemampuan masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan. Artinya,, tidak ada

masyarakat yang sama sekali tidak memiliki akal sehat, karena jika demikian akan dikategorikan musnah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, mendukung potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif,, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berkekuatan. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menegakkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula modernisasi institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya., Yang terpenting disini adalah peningkatan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya., Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi dan penguatan.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena,

pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, menguatkan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan Craig dan (May, Hapsari, A., & Kinseng, R. A. 2018). Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Partisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat memiliki karakteristik (Achmad, F. J. 2018) yaitu: (1) Partisipasi pasif atau manipulatif. Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka, (2) Partisipasi informatif. Di sini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Ketelitian hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat. (3) Partisipasi konsultatif. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti, (4) Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan. (5) Partisipasi fungsional. Masyarakat

membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya. (6) Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, Pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan. (7) Mandiri (*self mobilization*). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan. Yang terpenting, masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kampung Adainasosen Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, dengan waktu penelitian Januari 2022. Responden yang terlibat yaitu 10 orang terdiri dari pemerintah desa, dan masyarakat. Jenis penelitian deskriptif yaitu mengurai fakta lapangan kedalam deskripsi kalimat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menelaah dokumen-dokumen terkait (Sugiyono, 2016).

Analisis data digunakan dengan cara menganalisis berbagai fenomena dilapangan dilakukan langkah langkah yaitu: Mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi, reduksi data, penyajian data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi di kampung adainasosen merupakan sebagai

respon peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat setempat agar lebih produktif dan mandiri, serta memberikan dampak positif bagi desa dalam aspek ekonomi. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pemerintah pusat untuk menciptakan kreativitas masyarakat desa sebagai upaya mengelola potensi daerah secara sadar dan kreatif. Untuk memahami bentuk partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya proses pemberdayaan dapat dilihat hasil penelitian dibawah.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring timbulnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintahnya. Rasa percaya ini akan tumbuh bila masyarakat mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang setara. Perencanaan pembangunan kampung secara partisipatif dilakukan kepala kampung dengan mengikutsertakan warga masyarakat untuk bermusyawarah dalam setiap kebijakan. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting karena masyarakat menjadi sebuah pelaku pemberdayaan. Fenomena partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan Kampung Adainasnoson Distrik Samofa berdasarkan hasil wawancara di bawah.

‘Keikutsertaan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan hanya sebatas pada Musrembangdes. Hal ini dilihat dari sangat minimnya keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur dalam bentuk fisik. Kurang keterlibatan ini karena adanya masyarakat yang beranggapan pembangunan tersebut tidak memihak pada mereka. Padahal jika dipikir bahwa pembangunan fisik oleh pemerintahan desa merupakan asset yang dimiliki bersama (Wawancara, Januari 2022)’

Wawancara yang lain dengan responden mengungkap terkait partisipasi.

‘Masalah partisipasi memang sangat rendah karena faktornya datang dari pihak pemerintah kampung tidak mengajak atau menginformasikan kepada masyarakat jika ada kegiatan-kegiatan dalam hal pembangunan. Kebanyakan pekerjaan pembangunan dikerjakan oleh pihak kontraktor

walaupun pekerja kasarnya dari masyarakat setempat. Maksud saya, seharusnya pekerjaan pembangunan itu tidak perlu dikerjakan oleh kontraktor melainkan oleh masyarakat karena biaya pembangunan akan lebih besar jika hal itu dikerjakan oleh kontraktor (Wawancara, Januari 2022)’

Wawancara yang lain dengan responden mengungkap terkait partisipasi.

‘Dalam pelaksanaan pembangunan di kampung ini, sebenarnya tidak ada istilah memilah-milah masyarakat dalam hal pembangunan. Hal ini mungkin yang mendasari keikutsertaan masyarakat dalam hal pembangunan masih sangat rendah. Karena mungkin mereka berpikir kalau pembangunan itu bukan untuk mereka (Wawancara, Januari 2022)’

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber/informan yang telah dilakukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada desa/kampung Adainasnoson belum sesuai dengan harapan dan masih sangat rendah. Hal ini sebagian pelibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan guna pembangunan infrastruktur hanya sebatas musrembang saja, selain itu pemerintah desa tidak memberikan informasi dan sosialisasi terkait program yang akan dijalankan di kampung Adainasnoson sehingga masyarakat setempat kurang terlibat dalam proses pemberdayaan dan menganggap bahwa pemberdayaan tersebut hanya semata suksesi program pemerintah kampung saja yang tidak memiliki dampak kepada masyarakat setempat.

Fenomena yang lain dapat dilihat dari wawancara responden sebagian masyarakat beranggapan bahwa infrastruktur tersebut bukan asset mereka dan juga kebanyakan pengerjaan pembangunan dalam bentuk fisik lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor. Namun, walaupun hal itu terjadi pemerintahan desa/kampung terus berupaya untuk tetap menghimbau perlu kiranya masyarakat untuk terlibat langsung baik dalam prosen perencanaan hingga pada pengerjaan pembangunan di desa/kampung Adainasnoson.

Yang kita ketahui bersama bahwa partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban daerah. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah (Hardianti, S. 2017).

Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien (Muda, I., & Batubara, B. M. 2021).

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan

Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan telah mengakibatkan hubungan harmonisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat yang berpengaruh oleh tingkat kemaksimalan proses pembangunan desa, secara umum kita ketahui bahwa jika masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan desa maka segala kemungkinan pembangunan desa akan lebih progres dan positif, untuk mengetahui berbagai bentuk kendala dalam proses partisipasi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat hasil wawancara berikut.

Hasil wawancara dengan responden mengenai penghambat partisipasi.

'Konsep pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat memang belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan pemerintahan kampung masih fokus dalam pembangunan sarana dan prasarana kampung. Jadi, kami belum terlalu memperhatikan hal tersebut karena menurut kami hal itu akan dijalankan apabila pembangunan sarana dan prasana telah dijalankan dan tidak ada lagi persoalan terhadap hal tersebut (Wawancara, Januari 2022)'

Wawancara yang lain dengan responden mengungkap terkait penghambat partisipasi.

'Kepedulian Pemerintah Kampung dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk kesejahteraan yang diinginkan masyarakat itu ada, namun kami masih melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pemerintahan kampung, hal ini menjadi skala prioritas kami guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan data-data kependudukan. Namun, walaupun begitu kami tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat karena itu tujuan utama kami'

Hasil wawancara diatas mengenai faktor penghambat dalam partisipasi pemberdayaan masyarakat terkait program pembangunan infrastruktur di kampung Adainasosen, ialah rendahnya partisipasi masyarakat itu sendiri sehingga mengakibatkan pembangunan infrastruktur di kampung Adainasosen tidak berjalan secara maksimal, hasil wawancara juga mengungkap bahwa pembangunan infrastruktur kampung Adainasosen sebenarnya merupakan kepedulian pemerintah untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana terhadap masyarakat agar masyarakat dapat menikmati fasilitas yang ada akan tetapi masyarakat disini memandang lain pembangunan tersebut menganggap bahwa pembangunan ini merupakan orientasi dan tanggungjawab pemerintah desa saja, sehingga masyarakat kian apatis untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Hasil penelitian (Maryam, D. 2015) sangat penting kiranya masyarakat berpartisipasi dalam

pembangunan pedesaan, karena ini menyangkut keperluan dan kepemilikan bersama.

Faktor penghambat yang lain dalam partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan pembangunan infrastruktur di kampung Adainasnoson, yaitu menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara informan dapat dilihat dibawah.

'Pemberdayaan masyarakat dalam konteks meningkatkan kesejahteraan sosial yang dilakukan memang belum terlaksana dengan baik, hal ini karena jika diperhatikan pemerintahan kampung masih menjalankan pembangunan infrastruktur kampung. Hal ini yang diperhatikan mungkin karena pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus dari pembangunan pemerintahan kampung Adainasnoson (Wawancara, Januari 2022)'

Hasil wawancara dengan responden mengenai penghambat partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat

'Kesejahteraan sosial masyarakat kampung Adainasnoson jika diperhatikan memang masih sangat jauh dari harapan. Hal ini karena sebagian besar masyarakat kampung bermata pencaharian dengan bertani. Memang seharusnya pemerintahan kampung memperhatikan hal tersebut, mungkin dengan melakukan sosialisasi tentang cara bertani yang baik, sehingganya jika hasil sosialisasi itu diterapkan dengan baik tentunya akan sedikit memperbaiki perekonomian masyarakat setempat (Wawancara, Januari 2022)'

Hasil wawancara diatas terkait faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan di kampung Adainasnoson yaitu mengenai kesejahteraan sosial masyarakat, hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dalam proses pemberdayaan program pembangunan infrastruktur desa di kampung Adainasnoson memang sangat berdampak buruk terhadap masyarakat, dianggap bahwa pembangunan infrastruktur semata mata merupakan program pemerintah desa saja yang tidak berefek signifikan terhadap hajat hidup dan kebutuhan sosial masyarakat setempat, sebaiknya bahwa pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan berdampak yaitu infrastruktur pertanian karena masyarakat disini menggantungkan hidup

dengan pertanian itu sendiri. Hasil penelitian (Hermawan, Y., & Suryono, Y. 2016) mengungkap bahwa jika pembangunan infrastruktur desa tidak berdasarkan pada aspek kebutuhan mata pencaharian masyarakat setempat akan berefek pada proses kesejahteraan masyarakat dan tentu pemerintah dianggap gagal dalam menciptakan sarana publik yang sifatnya basis kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi di Kampung Adainasnoson Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor dinilai belum berjalan secara maksimal karena masyarakat hanya dilibatkan pada Musrembang, selain itu pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan informasi terhadap masyarakat mengenai bentuk program pemberdayaan di kampung Adainasnoson.

Faktor penghambat yang timbul terkait partisipasi masyarakat yaitu: kurangnya partisipasi masyarakat dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Pemerintah dianggap menjalankan program pembangunan infrastruktur tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat yang dimana masyarakat setempat mayoritas sebagai petani, selebihnya pemerintah membangun sarana prasarana pertanian agar mempengaruhi produktifitas pertanian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. J. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Kampung Pelangi Di Kota Semarang* Diterbitkan, Doctoral Dissertation, Faculty Of Social And Political Sciences.
- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARISTO*, 5(1), 126-140.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2).
- Faricandy, D. H., & Agunggunanto, E. Y.

- (2018). *Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak* Diterbitkan, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Hapsari, A., & Kinseng, R. A. (2018). Hubungan partisipasi dalam program pemberdayaan UMKM dengan tingkat kesejahteraan peserta. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 1-12.
- Hardianti, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *Katalogis*, 5(1).
- Hermanto, L. (2017). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Nelayan Berbasis Komunitas Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 160-188.
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(1), 97-108.
- Maryam, D. (2015). Perencanaan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. *Bina'Al-Ummah*, 10(1).
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192-200.
- Modim, M. H., Alam, A. S., & Rusli, A. M. (2010). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pari-wisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat). *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 29-36.
- Miradj, S., & Sumarno, S. (2014). Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses pendidikan nonformal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Halmahera Barat. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(1), 101-112.
- Pariangu, U. T. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Pemp) di Kabupaten Kupang. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 307-325.
- Perdana, F. R. (2019). Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Ramah Anak di Badran Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 3(1), 161-188.
- Sandiasa, G., & Widnyani, I. A. P. S. (2017). Kebijakan penguatan lembaga pemberdayaan dalam meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat di perdesaan. *Dalam Locus Majalah Ilmiah Fisip*, 8, 64-78.
- Sinaga, H. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Untuk Meningkatkan Kesejahteraannya Di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga. *TAPIAN NAULI: Jurnal Penelitian Terapan Perikanan dan Kelautan*, 1(1), 61-73.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*: Alfabeta. Bandung
- Kadir, A. G. (2013). Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
- Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 15-27.
- Wirastari, V. A., & Suprihardjo, R. (2012). Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya). *Jurnal teknik ITS*, 1(1), C63-C67.